



## Implementasi Program Penurunan Stunting Di Kota Sukabumi

Nur Intan Marienda<sup>1</sup>, Ike Rachmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Received: 13 November 2024  
Revised: 19 November 2024  
Accepted: 26 November 2024

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penurunan stunting di Kota Sukabumi. Dengan menggunakan teori Edwards III (1980) tentang implementasi kebijakan, penelitian ini menganalisis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memengaruhi efektivitas program penurunan stunting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti program PMT, kampanye edukasi, dan kegiatan komunitas, namun masih terdapat tantangan dalam menurunkan angka stunting di Kota Sukabumi. Aspek komunikasi menunjukkan adanya upaya koordinasi antarinstansi dan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada berbagai pihak terkait. Namun, masih ditemukan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan anak dan partisipasi aktif dalam program penurunan stunting. Sumber daya, termasuk tenaga kerja, anggaran keuangan, dan infrastruktur kesehatan, telah tersedia namun masih perlu dikelola secara efisien untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Disposisi para pelaksana kebijakan terhadap program penurunan stunting menunjukkan tingkat komitmen yang beragam, namun upaya untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pihak terus dilakukan. Struktur birokrasi, terutama melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, memiliki peran sentral dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program penurunan stunting. Kerjasama lintas sektor dan koordinasi antarunit kerja menjadi kunci dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan disposisi positif para pelaksana kebijakan, serta perbaikan struktur birokrasi untuk mencapai tujuan penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Sukabumi.

**Keywords:** Implementasi Program, stunting

(\*) Corresponding Author: [nurintanmarienda@gmail.com](mailto:nurintanmarienda@gmail.com)

**How to Cite:** Marienda, N. I., & Rachmawati, I. (2024). Implementasi Program Penurunan Stunting Di Kota Sukabumi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14584931>

## PENDAHULUAN

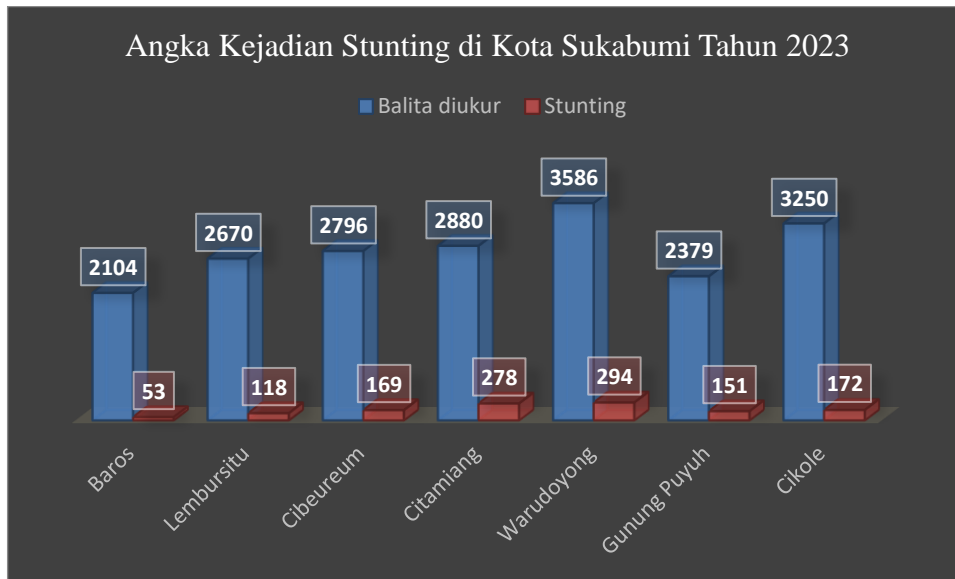
Permasalahan *stunting* menjadi agenda pembangunan nasional, dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada 2024. Angka *stunting* di Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan signifikansi. Data Dinas Kesehatan Jawa Barat capaian tahun 2022 menunjukkan prevalensi *stunting* di Jawa Barat 20,2% dengan penurunan 4,3% dibandingkan tahun 2021. Prevalensi tersebut berada di bawah angka nasional sebesar 21.6%. Sementara menurut data SSGI, rata-rata penurunan *stunting* dalam 3 tahun terakhir di Jawa Barat adalah 2% per tahun. (Pamungkas, 2023).

Kota Sukabumi menjadi salah satu dari 154 Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi prioritas baru pada 2022. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Sukabumi masih ada 1.150 balita yang mengalami *stunting*. Angka tersebut jika dipersentasekan mencapai 5,5 persen dari total populasi balita di Kota Sukabumi. Pelaksanaan program penanggulangan *stunting* yang ada di Kota Sukabumi lebih memfokuskan pada pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk anak yang terkena *stunting*. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/84-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Sukabumi.

Penurunan *stunting* adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengatasi masalah *stunting* atau kekurangan gizi kronis pada anak. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus baru *stunting* di Kota Sukabumi dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi yang seimbang bagi anak-anak. Upaya yang dilakukan dalam program Penurunan *stunting* meliputi pendekatan dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan dan gizi pada anak, penyuluhan tentang gizi seimbang, pengembangan kebun sayur keluarga, dan penyediaan makanan tambahan bagi balita yang terancam *stunting*. Diharapkan dengan adanya program ini, angka kejadian *stunting* di Kota Sukabumi dapat menurun dan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.

Dalam aspek Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi melalui program posyandu sebagai upaya pencegahan *stunting* adalah POPM (Pemberian Obat Pencegahan Pasal) cacangan, penanggulangan diare, sanitasi dasar serta peningkatan gizi. Dalam aspek pendidikan, Pemerintah Kota Sukabumi mengajak siswa-siswi SMA yang ada di Kota Sukabumi untuk melakukan Percepatan Penurunan *Stunting* tema "Remaja Kota Sukabumi Siap Cegah *Stunting*", dengan nama aksi "Move On Gaess" menjadi komunitas penentu kualitas generasi yang akan datang tanpa *stunting* (penurunan *stunting*) tahun 2024. Sedangkan dalam aspek sosial yakni mensinergikan dengan GERMAS (Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat) yang tidak dapat diabaikan sebagai salah satu ikhtiar untuk tetap sehat.

Namun, hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih adanya kasus *stunting* di Kota Sukabumi. Adapun data kejadian *stunting* di Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Angka Kejadian *Stunting* di Kota Sukabumi Tahun 2023  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapatnya angka kejadian *stunting* di Kota Sukabumi, dengan persentase yang besar terdapat di Kecamatan Citamiang yaitu 9.65% dengan jumlah *stunting* yaitu 278 dari jumlah balita yang diukur sejumlah 2.880 balita. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas Puskesmas, hal tersebut diketahui karena banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti tentang masalah *stunting*, orang tua bayi atau balita masih banyak yang tidak mau membawa anaknya ke Posyandu untuk di pantau tumbuh kembangnya. Adapun alasan mengapa kurang aktif di posyandu adalah karena orangtua sibuk dengan pekerjaan. Selain itu, orangtua kurang sadar akan pentingnya perawatan kesehatan anak atau kurang memahami manfaat posyandu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Edward III implementasi kebijakan untuk menganalisis dan memahami bagaimana program penurunan *stunting* di Kota Sukabumi dilaksanakan serta dampak efektivitasnya dalam mencegah *stunting*. Edwards III (1980) menyatakan penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## METODE

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti berangkat dari situasi sosial, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara maupun dokumentasi kepada informan yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pegawai Dinas Kesehatan, petugas puskesmas dan ibu yang memiliki balitas *stunting*.

## HASIL & PEMBAHASAN

## **Komunikasi**

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980), komunikasi merupakan aspek krusial dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan kebijakan disampaikan dengan jelas dan konsisten kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan keterbukaan informasi, kepastian pesan, serta keterlibatan stakeholder dalam proses implementasi. Penggunaan media dan saluran komunikasi yang tepat juga diperhatikan untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik kepada berbagai pihak terkait. Dengan demikian, komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan pelaksanaan dan keberhasilan suatu kebijakan.

Implementasi program penurunan stunting di Kota Sukabumi telah melibatkan serangkaian kegiatan komunikasi dan koordinasi antara para implementor kebijakan dan stakeholder terkait. Diantaranya adalah rapat koordinasi konvergensi stunting tingkat kota, pertemuan konvergensi intervensi stunting tingkat kecamatan, dan workshop pencegahan stunting di tingkat kota. Acara Rembuk stunting Kota Sukabumi tahun 2023, yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta perwakilan forkopimda, SKPD, camat, dan lurah, menjadi wujud nyata dari komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting.

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, menekankan bahwa stunting merupakan isu nasional yang menjadi perhatian khusus, dengan target penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2024. Dalam upaya mencapai target tersebut, berbagai inovasi telah digulirkan, seperti Sisters dari Bappeda, *Move on Guys* dari Dinas Kesehatan, dan program Pasti Penting dari DKP3 dan Bappeda. Kolaborasi dan komunikasi antarinstitusi menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program-program ini.

Selain itu, Forum Grup Diskusi (FGD) Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi juga menjadi upaya untuk menjaga kesehatan generasi masa depan. Dalam acara tersebut, berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Bappeda, Kementerian Agama, DP2KBP3A, serta Kepala Puskesmas, hadir untuk bersama-sama membahas langkah-langkah konkret dalam menangani masalah stunting. Prevalensi stunting yang naik dari tahun 2021 ke 2022 menjadi perhatian serius, sehingga intervensi yang spesifik dan sensitif perlu dilakukan untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan. Dengan demikian, melalui komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang kuat, diharapkan upaya penurunan stunting di Kota Sukabumi dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan generasi mendatang.

Hasil penelitian dari Rahmadini et al (2022) menunjukkan bahwa masalah *stunting* tidak terlepas dari masalah gizi masyarakat yang berhubungan dengan peningkatan risiko kematian, kesakitan, dan gangguan motorik maupun mental, sehingga berdampak pada kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting*. Desa Cikahuripan, tepatnya di Kampung Pameungpeuk, merupakan salah satu kampung yang memiliki kasus *stunting* pada anak. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai layanan kesehatan di dusun tersebut memiliki peran penting dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Dengan

menggunakan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan metode kualitatif wawancara langsung, ditemukan bahwa optimalisasi peran kader menjadi hal yang penting untuk modalitas pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan gizi.

### **Sumber Daya**

Menurut teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), sumber daya mencakup segala hal yang dapat digunakan dalam proses implementasi kebijakan. Ini termasuk tenaga kerja, anggaran keuangan, infrastruktur fisik, informasi, dan dukungan politik. Sumber daya ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang efisien dan efektif terhadap sumber daya tersebut menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi kebijakan. Dengan memastikan bahwa sumber daya tersedia dan digunakan dengan optimal, proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan.

Implementasi kebijakan penanggulangan stunting telah memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Tenaga kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah terbukti kompeten dalam mendukung keberhasilan program tersebut, sementara alokasi dana dan anggaran sudah tersedia untuk pelaksanaan program dengan lancar. Waktu yang telah ditetapkan sebelumnya juga telah dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, untuk memperluas dan mempercepat program penanggulangan stunting, Kota Sukabumi memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah tersebut, termasuk puskesmas, posyandu, dan fasilitas lainnya yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia di bidang kesehatan, seperti dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sukabumi dan mendukung program penanggulangan stunting. Secara keseluruhan, sumber daya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting akan diambil dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sukabumi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Hasil penelitian dari Afriani et al (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Sukabumi telah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung program ini dengan dukungan alokasi dana dari APBN dan APBD dalam pelaksanaannya. Selain itu, dukungan dari sumber daya manusia dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan di lapangan sudah berjalan dengan optimal, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami program percepatan penurunan *stunting* seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak dan balita sehingga dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

### **Disposisi**

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980), "disposisi" merujuk pada sikap, kecenderungan, atau orientasi mental dari para pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini mencakup berbagai faktor psikologis, politik, dan sosial yang dapat memengaruhi bagaimana para aktor kebijakan memandang, menerima, atau menolak suatu kebijakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, disposisi sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat dukungan, komitmen, dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang positif terhadap kebijakan, mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk melaksanakannya dengan baik. Sebaliknya, jika disposisi mereka negatif, hal ini dapat menghambat proses implementasi dan mengurangi efektivitas kebijakan.

Dalam menjalankan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Sukabumi, para pelaksana dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah berhasil memahami arah serta tujuan dari kebijakan tersebut. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melalui Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB), yang diadakan untuk memonitor pertumbuhan balita dengan cara menimbang Berat Badan (BB) dan mengukur Tinggi Badan (TB) guna menilai status gizi balita. BPB dijalankan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus, yang dilakukan melalui Puskesmas pada saat pelaksanaan Posyandu. Hasil dari kegiatan BPB menjadi penentu jumlah kasus stunting di Kota Sukabumi setiap tahunnya.

Selain itu, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan kesehatan dan gizi pada anak, penyuluhan tentang gizi seimbang, pengembangan kebun sayur keluarga, dan penyediaan makanan tambahan bagi balita yang terancam *stunting*. Diharapkan dengan adanya program ini, angka kejadian *stunting* di Kota Sukabumi dapat menurun dan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.

Hasil penelitian dari beberapa peneliti, termasuk Mintawati (2022) dan Nurajizah (2022), menyoroti permasalahan stunting sebagai prioritas utama di wilayah Sukabumi. Menurut data Mintawati, desa Cisaat di Sukabumi menunjukkan jumlah anak balita yang mengalami stunting cukup signifikan, mencapai 131 anak. Dampak dari stunting tidak hanya terbatas pada tumbuh kembang anak, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Nurajizah menemukan bahwa Kecamatan Palabuhanratu memiliki 56 balita stunting dari total 3128 balita. Implikasi stunting meliputi perkembangan kognitif, motorik, dan verbal yang tidak optimal serta peningkatan risiko kesakitan dan kematian. Penelitian oleh Utami et al. (2023) menegaskan bahwa pengetahuan, pola asuh, dan asupan makanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Hasil riset Khoiriyah et al. (2021) juga menunjukkan bahwa asupan energi, pola makan, kebersihan, dan status ekonomi keluarga berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Melalui penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peran dalam menanggulangi stunting, sedangkan masyarakat, khususnya ibu balita, diimbau untuk menerapkan pola makan yang seimbang guna mengurangi risiko stunting pada anak-anak.

### **Struktur Birokrasi**

Dalam konteks teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980), "struktur birokrasi" merujuk pada organisasi atau sistem administratif yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup hierarki, peran, fungsi, dan prosedur yang ada dalam suatu lembaga pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menjadi salah satu lembaga utama yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program tersebut. Di bawah Dinas Kesehatan, terdapat unit-unit kerja yang terlibat langsung dalam program penurunan stunting, seperti puskesmas, posyandu, dan tim kesehatan keluarga. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan lembaga terkait lainnya juga terjadi untuk mendukung program ini. Seluruh struktur birokrasi ini bertugas untuk memastikan bahwa program penurunan stunting di Kota Sukabumi dapat berjalan efektif dan efisien, serta mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dalam struktur ini, koordinasi antarunit kerja dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan keselarasan dan kesinambungan program serta pengambilan keputusan yang tepat guna peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan stunting.

Struktur birokrasi di Dinas Kesehatan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mengelola bidang kesehatan, dan hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten hingga Puskesmas dan Bidan Koordinator, beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain: a) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan internal untuk menerapkan kebijakan; b) Fragmentasi yang merupakan pembagian tanggung jawab di antara unit-unit organisasi yang tersebar luas. Pembagian tugas, kewajiban, dan hak berperan penting dalam pengaruh birokrasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan (Kurniawan, et al., 2021). Penerapan birokrasi memudahkan pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan. Dalam konteks penanggulangan stunting, birokrasi pemerintahan memiliki peran penting dalam formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan serta penanganan masalah yang muncul. Keterlibatan para pemangku kepentingan berdampak pada efektivitas analisis kebijakan (Prasetyo, 2020). Birokrasi yang terlibat meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Pengelola Gizi, dan Bidan, dengan sasaran kebijakan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 6 hingga 24 bulan.

Adapun keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/84-BAPPEDA/2022 menetapkan kelurahan-kelurahan sebagai Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Sukabumi Tahun 2022. Daftar kelurahan tersebut mencakup Benteng Warudoyong, Dayeuhluhur Warudoyong, Sukakarya Warudoyong, Sriwedari Gunungpuyuh, Gunungpuyuh Gunungpuyuh, Karangtengah Gunungpuyuh, Gedongpanjang Citamiang, Nanggaleng Citamiang, Jayamekar Baros, dan Selabatu Cikole.

Hasil penelitian Syahril & Radjabessy (2023), mengungkapkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksana pencegahan dan penanggulangan stunting di Puskesmas Jambula dalam tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan seluruh program mengikuti SOP. Dalam analisis implementasi kebijakan, struktur birokrasi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, dipantau, dan dievaluasi. Struktur birokrasi yang efektif dan efisien dapat memfasilitasi koordinasi antarbagian atau unit kerja yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik juga memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap perubahan atau tantangan yang muncul selama proses implementasi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari implementasi program penurunan stunting di Kota Sukabumi menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas dan konsisten kepada semua pihak terkait. Keterlibatan stakeholder dan penggunaan media yang tepat menjadi strategi penting dalam meningkatkan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Kedua, optimalisasi sumber daya, termasuk tenaga kerja, anggaran keuangan, dan infrastruktur fisik, memainkan peran krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Manajemen yang efisien dan efektif terhadap sumber daya tersebut menjadi kunci kesuksesan. Ketiga, disposisi atau sikap positif dari para pelaksana kebijakan terhadap program penurunan stunting sangat penting dalam memotivasi dan mempercepat pelaksanaan program. Disposisi yang positif akan mendukung tingkat dukungan, komitmen, dan partisipasi yang optimal. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap perubahan atau tantangan yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, melalui komunikasi yang efektif, optimalisasi sumber daya, disposisi yang positif, dan struktur birokrasi yang baik, diharapkan upaya penurunan stunting di Kota Sukabumi dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan generasi mendatang. Disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi antarunit kerja, komunikasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan kesinambungan dan kesuksesan program penurunan stunting di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, I., Marta, H., & Novelia, S. (2022). The Implementation Of Government Policy To Accelerate Integrated Stunting Reduction In Sukabumi Regency. *Teikyo Medical Journal*. 45(2) 5363- 5369
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Khoiriyah, H. I., Pertiwi, F. D., & Prastia, T. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Desa Bantargadung Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. *Promotor*, 4(2), 145-160.
- Kurniawan, I., Misnaniarti, M., & Flora, R. (2021). Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(4), 328-336.
- Mintawati, H. (2022). Pembinaan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Cisaat Kabupaten Sukabumi. *Healthy: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(2), 109-120.
- Nurajizah, E. (2022). Analisis Faktor Riwayat Kehamilan Dan Riwayat Bayi Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Usia 6-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Palabuhanratu Sukabumi Tahun 2021. *SIBATIK*

*JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(6), 771-778.

- Pamungkas, W. W. (2023). Program Jabar Penurunan stunting Diklaim Berbuah Positif. <https://bandung.bisnis.com/read/20230312/549/1636512/program-jabar-zero-new-stunting-diklaim-berbuah-positif> diakses pada 24/02/2024
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Konteks Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement): Studi Kasus Program Revaluasi Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(2), 1-16.
- Rahmadini, E. N., Qoyumi, I. A. N., Bismoyo, M. A., Fania, N., Febrianto, R., Syarafah, S. P., ... & Yasmin, T. S. (2022). Optimalisasi Peran Kader Posyandu Terhadap Pencegahan Stunting Di Dusun Pameungpeuk Desa Cikahuripan Sukabumi. *Zahra: Journal Of Health And Medical Research*, 2(4), 284-292.
- Surat Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/84-BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Sukabumi.
- Syahril, F., & Radjabessy, S. (2023). Implementasi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Jambula. *Jurnal Serambi Sehat*, 16(1), 26-40.
- Utami, R. N., Pandarugan, S. L., & Nambiar, N. (2023). The Relationship Between of Knowledge Parenting and Food Intake on the Incidence of Stunting in Toddlers in Sukabumi Regency. *KnE Social Sciences*, 267-277.